**AGAMA, NEGARA, DAN RUANG PUBLIK
MENURUT HABERMAS
(Catatan Penting untuk Pluralisme Agama di Indonesia)**

Oleh Ibrahim¹

Pengantar

Ruang publik seringkali disengketakan. Klaim atas kepemilikan ruang publik pada ranah praksis menyebabkan banyaknya konflik yang mengarah, tidak hanya pada potensi disintegrasi, tetapi juga sampai pada tataran penggerusan nilai-nilai dasar kemanusiaan. Sudiarja (2008:63) mengatakan bahwa kelompok-kelompok sedemikian rupa bersaing dalam masyarakat sehingga kelompok yang tidak berafiliasi pada kelompok dengan keyakinan tertentu kurang mendapatkan perhatian. Kondisi ini menurut Sudiarja sangat berpeluang dalam membentuk corak masyarakat ke-aku-an (*me-first society*) sebagaimana dikritik oleh Giddens.

Kondisi kehidupan keagamaan di Indonesia dewasa ini adalah contoh nyata dari perebutan atas ruang publik. Juga merupakan aplikasi dari ketidakteraturan gagasan dalam penataan ruang publik yang damai bagi masyarakat plural seperti Indonesia. Masyarakat *postsekular* yang dibayangkan Habermas berusaha memadu-padankan eksistensi agama di ruang-ruang modernitas masih nampak tergagap dalam upaya implementasinya. Memang, sekalipun Habermas tidak akrab dengan fenomena kemasyarakatan di Indonesia, namun gagasannya tentang ruang publik sangat inspiratif bagi penataan kehidupan sosial yang equal dan bebas dari prasangka mayoritas semata. Tulisan ini akan mengeksplorasi pandangan Habermas mengenai ruang publik dan penulis berkepentingan untuk menunjukkan kasus praktis untuk sebuah catatan reflektif.

Ruang Publik Habermas

¹ Ibrahim adalah Dosen Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung dan Sekretaris Eksekutif pada Institut untuk Kebijakan Publik dan Lintas Demokrasi (Intiklad) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Aktif melakukan penelitian, menulis di berbagai media massa, dan menjadi pembicara pada berbagai seminar dan diskusi.

Habermas (dalam Budi Hardiman, 2009:151) mengatakan bahwa ruang publik adalah semua wilayah kehidupan yang memungkinkan kita untuk membentuk opini publik. Wilayah ini menurutnya harus bebas dari dominasi dan sensor. Semua warga pada dasarnya dapat memasuki ruang yang demikian karena setiap individu pada dasarnya adalah warga privat yang karena sifat percakapannya menyangkut kepentingan umum, maka mereka memasuki wilayah publik. Situasi demikian mensyaratkan jaminan untuk berkumpul secara bebas dan menyatakan pendapatnya secara bebas pula.

Ruang publik dengan demikian bercirikan pada keadaan akses oleh semua orang dan mengacukan ciri inklusif. Habermas memahami ruang publik juga sebagai jejaring untuk komunikasi tema-tema dan sikap-sikap. Ruang publik terdapat dimana saja karenanya ia majemuk. Habermas menghubungkan konsep ruang publiknya dengan konsep masyarakat warga. Menurutya, masyarakat warga terbentuk jika warganegara bebas mencapai kesepakatan untuk meraih tujuan-tujuan sosial politis mereka dan membentuk sebuah asosiasi otonom, lepas dari kepentingan birokrasi dan pasar. Aktor-aktor privat dalam masyarakat secara bersama-sama membangun ruang diskursif. Aktor-aktor ini mengambil bagian dalam reproduksi ruang publik (Budi Hardiman, 2009:134-137). Manusia-manusia privat melibatkan diri dalam proses perdebatan rasional kritis dan kemudian melahirkan sebuah universalitas yang menjadi landasan pemikiran dan opini mayoritas setelahnya (Habermas, 2010:167). Dalam hal ini, tindakan komunikatif untuk mencapai pemahaman tentulah mengandaikan kesepakatan yang didorong oleh motivasi rasional di antara para partisipan dan dapat diukur berdasarkan klaim validitas yang dapat dikritik (Habermas, 2009:96).

Telaah Habermas mengenai ruang publik memberi perhatian khusus pada kondisi masyarakat *postsekular*. Masyarakat *postsekular* adalah sebuah masyarakat modern yang kembali melihat nilai-nilai agama sebagai sesuatu yang penting. Munculnya gagasan mengenai *postsekular* dalam pandangan Habermas dilatarbelakangi oleh beberapa kenyataan berikut (dalam Sunarko, 2010:223-228). *Pertama* bahwa perkembangan naturalisme semakin mengarah pada instrumentalisasi faham manusia, terutama pandangan yang menempatkan

pengalaman pancaindra sebagai alat ukur kebenaran tunggal. *Kedua*, menurut Habermas, aksi-aksi teror yang marak belakangan ini merupakan reaksi atas modernisasi Barat yang hanya membawa kekosongan makna dan merupakan respon atas ketertindasan yang disebabkan oleh arogansi modernisasi Barat. *Ketiga* adalah semakin menipisnya nilai-nilai solidaritas warga. Warga dalam situasi modernisasi berubah menjadi *monade-monade* yang terisolasi satu sama lain dan kerap kali bertindak atas nama kepentingan sendiri.

Itulah sebabnya, Habermas menekankan pentingnya untuk belajar dari agama dan mentransformasikan nilai-nilai agama dalam ruang sosial. Ia mencatat bahwa perjumpaan antara Kristen dan Filsafat Yunani pada mulanya juga berhasil mensintesis konsep-konsep normatif, misalnya tanggung jawab, otonomi dan pembenaran, sejarah dan memoria, emansipasi dan pemenuhan, individualitas dan sosialialitas, dan sebagainya. Hal penting lainnya adalah bagaimana menempatkan agama sebagai sarana untuk mengembalikan kesadaran kolektif manusia mengenai solidaritas. Agama juga merupakan arena yang efektif untuk memberi motivasi sosial (Sunarko, 2010:224-227). Solidaritas kiranya menjadi penting karena minimnya solidaritas akan berpotensi menjadikan antar komunitas dapat dengan mudah diadu domba (Sudiardja, 2005:67).

Melihat kembali agama sebagai sesuatu yang penting menurut Habermas harus dilakukan dengan aturan-aturan yang disepakati (dalam Sunarko, 2010: 229-231). *Pertama*, harus ada pra kondisi dimana semua anggota masyarakat dengan bekal metafisik yang bervariasi memiliki kehendak untuk berkomunikasi. Dalam kondisi ini, gagasan yang dirumuskan dalam bahasa religius diperhatikan dan didiskusikan secara kritis sebagai sesuatu yang berpotensi kognitif dalam ruang yang setara. Kebebasan beragama menjadi penting dalam hal ini untuk dimaklumi oleh berbagai kalangan. *Kedua*, semua warga masyarakat, beragama dan tidak beragama, harus menerima prinsip bahwa negara bersikap netral dalam hal pandangan hidup. Pemerintah harus netral dan tidak mendasarkan diri pada agama tertentu. *Ketiga*, ada pembedaan ruang publik, yakni ruang publik informal dan ruang publik formal. Dalam ruang publik informal, pihak beragama tetap boleh mengungkapkan bahasa-bahasa religius dan dalam kondisi ini pihak tak beragama

dituntut kerjasamanya untuk mengerti bahasa religius tersebut. Sementara itu, dalam ruang publik formal, yang berlaku hanyalah argumentasi yang berdasarkan akal budi. Sejauh pihak beragama dapat menyampaikan argumentasi religius dalam bahasa sekuler, maka ia dapat mengklaim terlibat dalam proses pengambilan kebijakan dalam forum formal yang sekuler tersebut.

Pandangan Habermas dengan demikian jelas bahwa agama mendapatkan kembali posisinya setelah dalam modernisasi mengalami penggerusan. Hanya saja, Habermas menekankan keterlibatan agama dalam ruang-ruang tertentu. Meniadakan peran agama dalam arus modernisasi berarti mengesampingkan fakta bahwa agama dapat menjadi sumber pembelaan terhadap kaum minoritas sebagaimana dilakukan oleh kaum gereja di Amerika. Ada potensi yang menurut Habermas dapat digali dari tradisi-tradisi religius. Hanya saja, tradisi-tradisi religius juga tidak dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pengaturan ruang publik formal karena berpotensi untuk dijadikan sebagai alat bagi kelompok mayoritas untuk melaksanakan kehendaknya (Sunarko, 2010:232-234).

Kekerasan Antar Keyakinan di Indonesia:

Belajar Penataan dari Habermas

Jika diperhatikan, konsep pengaturan ruang publik di Indonesia jelas tidak memiliki batas-batas yang tegas. Bukan pemberlakuan bahasa sekuler dalam kedua ruang publik (formal dan informal) sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls, bukan pula memperkenalkan bahasa agama dalam kedua ruang publik tersebut sebagaimana dikemukakan Nicholas Wolterstorff (lihat kritik Habermas terhadap Rawls dan Wolterstorff dalam Sunarko, 2010:232-233). Mirip ketika Budi Hardiman (2009:79) mengatakan bahwa Indonesia hendak mengambil jalan tengah antara kapitalisme dan sosialisme dalam bentuk ideologi Pancasila, namun tidak berhasil menemukan mediasi teoritis yang meyakinkan sehingga yang dihasilkan hanyalah hibrid atas keduanya.

Kasus kekerasan atas nama agama adalah bentuk praksis dari ketidakmampuan negara menjernihkan batasan-batasan yang jelas mengenai kriteria ruang publik. Kekerasan yang dilakukan oleh kelompok tertentu terhadap

kelompok lain hanya karena perbedaan keyakinan-yang sebetulnya merupakan ruang privat- merupakan contoh nyata dalam hal ini. Kasus-kasus penyerangan terhadap Jamaah Ahmadiyah oleh kelompok tertentu merupakan teror yang mendasarkan pengaturan publik atas pemahaman suatu agama sebagaimana dikhawatirkan oleh Habermas ketika menolak pendapat Wolterstorff. Kasus *sweeping* yang dilakukan oleh kelompok agama tertentu terhadap kehidupan malam yang kerap kali dilakukan atas pembenaran dan klaim kebenaran sepihak menyebabkan intimidasi memasuki ruang-ruang kebebasan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Larangan pendirian tempat ibadah pada agama tertentu, pengusiran kelompok keyakinan, pengrusakan atas nama ketertiban dan ketentraman dengan dalih-dalih religius yang seakan terbiarkan merupakan bentuk kegagalan negara dalam memberi jaminan terhadap warganya. Haryatmoko (2003:62-63) mengatakan bahwa agama kerap kali bermuka dua, di satu sisi menawarkan perdamaian, kedalaman hidup, dan harapan yang kukuh, namun di pihak lain sering menjadi sumber dari konflik dan berujung pada kekerasan. Agama, menurutnya sering menjadi landasan ideologis dan pembenaran simbolis untuk mempertajam permusuhan.

Sebagai masyarakat religius, nilai-nilai spiritualitas berbasis keyakinan memang adalah warna dasar dari perikehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini melembaga dalam sistem keyakinan yang dipatuhi secara sadar oleh masyarakat pada komunitas tertentu. Namun patut kiranya dicatat bahwa Indonesia juga adalah negara plural dengan keragaman keyakinan yang tidak sedikit. Sebagaimana kata Habermas, meniadakan bahasa-bahasa religius dalam kehidupan sosial, tentu merupakan penggerusan atas nilai-nilai asasi manusia, namun menempatkan bahasa religius sebagai pedoman juga menyebabkan kekuatan mayoritas berpotensi memanfaatkan dominasi untuk menekan kelompok minoritas. Budi Hardiman (2009:157) mengatakan bahwa pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana religiusitas dapat diperhitungkan tanpa menindas pluralisme, tanpa melengkapkan toleransi, dan tanpa mencederai hak-hak asasi manusia?

Itulah sebabnya, Habermas mengemukakan perlunya hak-hak dasar bagi warga. Habermas (dalam Budi Hardiman, 2009:84) mengkategorikan dua hak, yakni hak-hak dasar kebebasan dan hak-hak partisipasi. Hak-hak dasar meliputi: hak untuk kebebasan bertindak yang dimiliki setiap orang tanpa diskriminasi, hak berdasarkan keanggotaan sukarela warga dalam sebuah komunitas politik, dan hak untuk perlindungan hukum yang sama. Sementara hak-hak partisipasi meliputi hak untuk mendapatkan peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam proses formasi opini dan aspirasi demokratis dan hak untuk mendapatkan jaminan atas kondisi-kondisi hidup yang dipastikan secara sosial, teknis, dan ekologis.

Dalam konteks keberagamaan di Indonesia, terlihat secara jelas bahwa negara tidak bisa memberikan setidaknya hak-hak dasar berupa kebebasan bertindak tanpa diskriminasi, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama, dan hak jaminan atas kondisi-kondisi hidup yang dipastikan secara sosial, teknis, dan ekologis. Kelompok agama tertentu, lebih kerap menjadi polisi masyarakat yang menggantikan peran penertib negara (dalam hal ini polisi) untuk menegakkan keyakinan mereka. Pada saat yang sama, negara cenderung pasif dalam menindak kelompok-kelompok mayoritas yang menekan kelompok minoritas. Kasus penyerangan ormas-ormas terhadap komunitas-komunitas tertentu, perusakan dengan dalih agama, pengusiran warga berbeda keyakinan, dan pemaksaan penggunaan klaim kebenaran merusak sendi-sendi komunikatif sebagaimana dikemukakan oleh Habermas.

Kiranya menarik mengandaikan kritik Habermas (2010:200-2003) terhadap peran negara yang melakukan intervensi dengan menabrak hak-hak privat pada masyarakat borjuasi sebagai proses intervensi kelompok mayoritas terhadap hak-hak minoritas, terutama dalam kebebasan berkeyakinan. Sudiardja (2008:67) mengatakan bahwa kedudukan jati diri akan semakin problematik ketika negara semakin tidak mampu memberi jaminan sosial, dan keadaan zaman yang tidak mendukung otonomi individu yang terbuka dan mandiri. Dalam kondisi ini, kelompok tertentu berusaha mempertahankan komunalitas yang lebih berfungsi sebagai negara kecil dalam negara besar. Itulah sebabnya, menurut Mohctar Pabottingi (2001:258) urusan agama dan politik harus dipisahkan.

Oleh karena itu, menderivasi pendapat Habermas mengenai posisi agama dalam masyarakat modern, maka hal-hal penting yang harus dilakukan adalah *pertama* kelompok-kelompok religius (apapun agamanya) perlu menerjemahkan bahasa religiusnya menjadi logis dan dapat diterima oleh berbagai kalangan. Habermas menyebut ini sebagai ujian universalisasi; perjuangan untuk pengakuan (Budi Hardiman, 2009:149). *Kedua*, masyarakat non beragama, yang jika dalam konteks Indonesia adalah masyarakat sekuler dan terbuka, dituntut untuk memahami dan memberi pengertian intersubjektif. Dialog antar keyakinan dan antar komunitas dengan demikian menjadi sebuah upaya gigih yang harus terus dilakukan. Sumarthana (2001:243) menyebut bahwa dalam masyarakat yang plural, maka sikap dialogis dan penuh toleransi menjadi tuntutan. Maka bagi Haryatmoko (2003:64), agama yang konkret adalah agama yang dihayati oleh pemeluknya sebagai sarana untuk membawa pada proses pemurnian agar membantu pemeluknya untuk mencari kedalaman hidup dan menyumbangkan peradaban yang menghormati kemanusiaan. *Ketiga*, negara harus netral dalam memberi jaminan atas hak-hak dasar, dalam arti mampu menjaga hak-hak minoritas dari penindasan warga atas warga. Dalam definisi ini, negara harus tegas melucuti kewenangan organisasi non negara yang kerap kali memperkosa hak aparat keamanan sebagai pengendali atas wujud ketertiban. *Keempat*, kelompok minoritas memiliki hak suara yang sama dalam bahasa-bahasa formal dalam sebuah sistem yang oleh Habermas disebut sebagai sistem demokrasi deliberatif. Memaksakan kehendak mayoritas melalui mekanisme demokrasi prosedural saja tidak cukup, yang dibutuhkan adalah komunikasi yang intensif antar warga dengan menafikkan persoalan mayor dan minor dalam arti kuantitatif. Sumarthana (2001:247) mengatakan bahwa relasi antaragama harus mampu membentuk solidaritas sosial yang tinggi. *Kelima*, perlu kiranya dicatat mengenai pentingnya konstitusi, tidak cukup sekedar pada batas netralitas negara, tetapi melembagakan konstitusi anti diskriminasi. Untuk melakukan ini, tentu para politisi dan birokrat yang ada di ruang-ruang formal perlu dulu melepaskan jubah keagamaannya sebagai pra kondisi. Karena hingga saat ini, inkonsistensi sikap itu justru hadir dari lembaga-lembaga formal kenegaraan.

Penutup

Kegagalan negara dalam memberi kepastian hukum sekaligus ketidakmampuannya dalam menegakkan prinsip netralitas hanya akan melanggengkan kekerasan atas nama keyakinan. Batasan ruang publik dan ruang privat harus diceraikan dengan menggaransikan ketegasan.

Habermas yang dalam gagasannya mensinyalir nilai-nilai positif agama sebagai sebuah bingkai bagi laju modernisasi sebenarnya menempatkan peran ruang publik sebagai kekuatan yang diniatkan untuk perlawanan terhadap negara. Suatu kondisi yang menurut Daniel Dhakidae dimana negara tunduk kepada warga (2001:15). Warga dalam kondisi masyarakat sipil mampu mengkomunikasikan kepentingannya sendiri di ruang-ruang publik sehingga menurut Sudiardja (2010) rakyat tidak perlu lagi menyusu pada instruksi pusat (negara) apabila menyangkut keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kehidupan bersama. Asosiasi-asosiasi otonom yang bernama masyarakat warga dituntut untuk mengedepankan prinsip komunikasi dalam meretas diskursus dan deliberasi atas nama kepentingan bersama, bukan malah terjebak dalam perebutan ruang publik komunitarian yang justru akan mencederai prinsip-prinsip solidaritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anton Sudiardja, 2005. *Arah Reformasi Indonesia, Sebuah Kilas Balik*, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Anton Sudiardja, 2008. *Mengapa Koruptor Bergeming dan Keyakinan Menjadi Keras, Telaah tentang 'Jati Diri' Manusia di Era Global, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Etika, Alam Pikir Hindu, Filsafat Manusia*, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Anton Sudiardja, 2010. *Ana Rembug Dirembug*, Opini di Harian Kompas, edisi 27 Oktober 2010.
- Daniel Dhakidae, 2001. *Sistem sebagai Totalisasi, Masyarakat Warga, dan Pergulatan Demokrasi dalam Masyarakat Warga dan Pergulatan Demokrasi, Menyambut 70 Tahun Jakob Oetama*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Frans Budi Hardiman, 2009. *Menuju Masyarakat Komunikatif, Ilmu, Masyarakat, Politik dan Postmodernisme Menurut Jurgen Habermas*, Kanisius, Yogyakarta.
- Frans Budi Hardiman, 2009. *Demokrasi Deliberatif, Menimbang 'Negara Hukum' dan 'Ruang Publik' dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*, Kanisius, Yogyakarta.
- Habermas, Jurgen, 2009. *Teori Tindakan Komunikatif, Buku Satu, Rasio dan Rasionalisasi Masyarakat, cetakan ketiga*, diterjemahkan oleh Nurhadi, Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Haryatmoko, 2003. *Etika, Politik dan Kekuasaan*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Habermas, Jurgen, 2009. *Teori Tindakan Komunikatif, Buku Dua, Kritik Atas Rasio Fungsionalis, cetakan kedua*, diterjemahkan oleh Nurhadi, Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Habermas, Jurgen, 2010. *Ruang Publik, Sebuah Kajian tentang Kategori Masyarakat Borjuis, cetakan ketiga*, diterjemahkan oleh Yudi Santoso, Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Mochtar Pabottingi, 2001. *Di Antara Dua Jalan Lurus dalam Masyarakat Warga dan Pergulatan Demokrasi, Menyambut 70 Tahun Jakob Oetama*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

**AGAMA, NEGARA, DAN RUANG PUBLIK MENURUT HABERMAS
(CATATAN PENTING UNTUK PLURALISME AGAMA DI INDONESIA)**

Penulis : Ibrahim

Dipublikasikan pada Jurnal Badati Volume II, No. 3, Desember 2010, FISIP-UKIM Maluku

Sunarko, 2010. *Ruang Publik dan Agama Menurut Habermas dalam Ruang Publik Melacak “Partisipasi Demokratis” dari Polis sampai Cyberspace*, editor F. Budi Hardiman, Kanisius, Yogyakarta.

Th. Sumarthana, 2001. *Mencari Model Hubungan Antaragama di Masa Mendatang, Beberapa Catatan Pengantar dalam Masyarakat Warga dan Pergulatan Demokrasi, Menyambut 70 Tahun Jakob Oetama*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.